

Analisis Penerapan Standar Masyarakat Miskin di BPS Kota Binjai

Aldira Ananda¹; Yenni Samri Nasution²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: aldiraananda@gmail.com¹; yenni.samri@uinsu.ac.id²

Abstract: Poverty is a condition in which a person or region is unable to improve quality of life or standard of living. Binjai cities are mentioned in a good category in the presentation of poverty compared to other cities in northern Sumatra. This study aims to find out the application of the standards of the poor society in the Central Statistical Authority (BPS) of Binjai City, using qualitative descriptive methods. The research finds that the concept used is that poverty is seen as an inability on the economic side to meet the food base not food measured on the expenditure side, and the concept is confined only to indicators of the poverty line, the presentation of the poor, the depth index of poverty, the index of misery. And there are two types of poverty data: micropoverty data and macro-poverty data.

Keywords: poverty measurement, Central Statistics Agency

Abstrak: Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang atau daerah yang tidak dapat meningkatkan kualitas hidup atau standar hidup. Kota binjai termasuk dalam kategori yang baik dalam presentase kemiskinan dibandingkan kota lain di Sumatra utara. dan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standarmasyarakat miskin diBadan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwakonsep yang digunakan BPSialah, kemiskinan di pandangng sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi dasar makanan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, dankonsep yang disajikan dibatasi hanya pada indikator garis kemiskinan, presentasi penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks kearah kemiskinan. Dan data kemiskinan memiliki dua jenis yaitu data kmiskinan mikro dan data kemiskinan makro.

Kata Kunci : Pengukuran Kemiskinan, Badan Pusat Statistik

PENDAHULUAN

Kemiskinan ialah sebuah masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan masyarakat untuk mencapai taraf ukuran hidup tertentu yang dianggap layak. Salah satu masalah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yakni tidak meratanya distribusi pendapatan kemudian diikuti dengan ketidakmampuan masyarakat mencapai akses pendidikan yang layak sehingga berdampak pada kurangnya kompetensi dan daya saing yang dimiliki dalam memperoleh kesempatan kerja dan berujung pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di Indonesia, pemenuhan hak masyarakat miskin tercantum dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 34 (Amandemen IV), ayat pertama yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemerintah juga telah menyusun strategi dimana arah pembangunan pendidikan Indonesia tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dirancang untuk mencapai Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawa Cita) Presiden dan Wakilnya. Tujuan RPJMN 2020–2024 adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. dengan focus utama dalam pembangunan sosial ekonomi dan pengentasan kemiskinan. (Bappenas, 2019).

Data mengenai kemiskinan yang digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi program yaitu data resmi yang bersumber dari BPS Penghitungan indikator-indikator kemiskinan dilakukan oleh BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang rutin diselenggarakan tiap tahun. Survei tersebut dilaksanakan diseluruh kabupaten/kota di Indonesia termasuk salah satunya di Kota Binjai. Data hasil Susenas dari Kota Binjai setiap tahun diolah untuk menghasilkan indikator-indikator kemiskinan pada level estimasi Kota Binjai. Salah satu kota di Sumatra Utara, Indonesia, adalah Binjai. Binjai terletak sekitar 22 km di sebelah Barat Kota Medan, ibu kota provinsi Sumatra Utara. Sebelum dipindahkan ke Stabat, Langkat menjadi ibu kota Binjai. Kota Binjai merupakan otonomi daerah dan menjadikannya salah satu kota yang berada di Indonesia. Kota Binjai telah ada sejak 1981 dan hingga saat ini telah 42 tahun (empat puluh dua tahun).

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Kemiskinan

Kemiskinan dapat dipandang dari dua sisi yaitu dari sisi konvensional maupun dari sisi non konvensional. Dari sisi konvensional, kemiskinan dipandang dari segi moneter yaitu kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan/konsumsi individu dengan menetapkan suatu batasan tertentu. Jika suatu penduduk berada dibawah batasan tersebut maka mereka digolongkan ke dalam penduduk miskin.

Menurut (Soekanto S. , 2004) kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu merawat dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun memanfaatkan tenaga fisik, maupun mental dalam kelompok tersebut.

Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) digabungkan untuk membentuk Garis Kemiskinan (GK). Jika rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan maka dikelompokkan menjadi penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) didefinisikan sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan seseorang sebesar 2100 kilokalori/hari. 52 jenis komoditi termasuk umbi-umbian, telur, umbi-umbian, ikan daging, susu dan telur, kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran lemak, dan minyak.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) ialah kebutuhan minimum untuk, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Komoditi dasar non makanan diperdesaan terdapat 47 jenis komoditi sedangkan di perkotaan terdapat 51 jenis komoditi (Susenas Panel Modul Konsumsi dan Kor.)

Rumus :

$$GK = GKNM + GKM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan GKM= Garis Kemiskinan Makan

Metode Penghitungan GKM

- a) Menetapkan kelompok referensi (reference population) yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok ini disebut sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung dengan mengurangi GK periode sebelumnya dengan inflasi umum (IHK). Kemudian, garis kemiskinan makanan (GKM) dan non- makanan (GKNM) dihitung dari populasi referensi ini.
- b) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) didefinisikan sebagai total nilai pengeluaran untuk 52 komoditi dasar makanan yang sebenarnya dikonsumsi oleh penduduk referensi yang kemudian dibulatkan menjadi 2100 kkal/hari. Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978 adalah referensi untuk patokan ini. Harga rata-rata kalori ke-52 komoditi tersebut, dihitung untuk mengimbangi nilai biaya kebutuhan minimal makanan. Formula utama untuk menentukannya ialah:

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \cdot Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

GKM_j = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disamakan menjadi 2100 kkal),

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j,

Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

V_{jk} = Nilai pengeluaran pada konsumsi komoditi k di daerah j.

j = Daerah (perkotaan/pedesaan)

Lalu, GKMj disamakan dengan 2100 kkl lalu dilakukan pengkalian 2100 pada harga pada implisit rata-rata kalori pada daerah (j) dari populasi referensi, sehingga:

$$\overline{HK}_j = \frac{\sum_{k=1}^n V_{jk}}{\sum_{k=1}^n K_{jk}}$$

$$F_j = \overline{HK}_j \times 2100$$

Kjk = Kalori pada komoditi K didaerah j.

HKj = Harga rata-rata kalori didaerah j.

Fj = Kebutuhan minimum makanan di daerah

j = yaitu menghasilkan energi sama dengan 2100 kkl/kapitas/hari.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah penghitungan nilai pada kebutuhan terdahnya dari beberapa komoditi non-makanan, seperti pendidikan, Kesehatan, Sandang dan Perumahan. Disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat, pilihan barang dan jasa non-makanan terus berkembang dan disempurnakan. Sebelum tahun 1993 ada 12 komoditi di pedesaan dan 14 komoditi di perkotaan. Namun, sejak tahun 1998, ada 25 subkelompok di pedesaan (47 jenis komoditi) dan ada 27 subkelompok di perkotaan (51 jenis komoditi). Nilai kebutuhan minimum untuk setiap komoditi atau sub-kelompok yang tidak berkaitan pada makanan dapat dihitung dengan membandingkan rasio pengeluaran komoditi atau sub-kelompok tersebut dengan pengeluaran total komoditi atau sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKP) pada tahun 2004 menentukan rasio tersebut. Nilai kebutuhan minimum non makanan dapat dihitung dengan :

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i \times V_i$$

NFp = Pengeluaran minimum non-makanan/garis kemiskinan non makanan pada daerah p (GKNMp),

Vi = Nilai pengeluaran/komoditi atau sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).

ri = Rasio pengeluaran komoditi atau sub-kelompok non-makanan pada daerah (hasil SPPKD 2004),

i = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.

p = Daerah (Pedesaan dan Perkotaan),

Presentase Penduduk Miskin

HCI-P0 (Head Count Index) ialah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK), dapat ditentukan dengan :

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$$

$a = 0$.

z = garis kemiskinan,

y_i = Rata-rata pengeluaran /kapita sebulan penduduk yang berada pada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada pada dibawah garis kemiskinan, n = jumlah penduduk.

Indeks Kedalaman Miskin

Poverty Gap Index-P1 (Indeks kedalaman kemiskinan) ,ialah ukuran dari perbedaan pengeluaran rata-rata orang miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Nilai indeks, yang lebih tinggi menunjukkan bahwa orang lebih jauh dari garis kemiskinan dalam hal pengeluaran rata-rata, dapat ditentukan sebagai berikut.

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$$

$a = 1$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.

Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) menunjukan gambaran tentang distribusi pengeluaran pada penduduk miskin, semakin besar ketimpangan pengeluaran diantara masyarakat miskin, jika nilai indeks semakin tinggi. pengeluaran diantara penduduk miskin. Dapat ditentukan sebagai berikut.

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$$

α = 2.

z = garis kemiskinan,

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$.

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan,

n = jumlah penduduk..

METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan peneliti ialah metode deskriptif, Disebut metode deskriptif dikarenakan metode yang bertujuan untuk mendeskriptifkan masalah sebagaimana adanya. Menurut Narbuko (2015: 44) Penelitian yang menggunakan deskriptif ialah penelitian bertujuan untuk menjelaskan pemecahan masalah yang ada dengan berdasarkan data dan sumber dengan menyajikan, menganalisa serta menginterpretasikannya.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pusat dan Statistik(BPS) kota Binjai. Terletak pada jalan Jl.Wr.Mongosidi, Satria, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatra Utara.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian menggunakan jenis data kualitatif dimana data kualitatif menurut, *et, al*(2019:218) ialah proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena social secara alami.

Sumber data yang dipakai oleh peneliti ialah data sekunder, menurut Sugiono (2018:456) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan judul penelitian

Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi keperustakaan, dimana metode dokumentasi menurut lexy, J Moeleng (2002:161) yaitu melah secara sistematis dari data-data tau dokumen-dokumen tertulis

secara langsung yang dipakaisebagai bukti dan keterangan, sedangkan Studi keperustakaan ialah, mengumpulkan liteatur keperustakaan yang berhubungan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

Sejarah BPS

Lembaga statistik di Indonesia telah didirikan di Bogor oleh Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan (Direktur Van Landbouw Nijverheld en Handel) pada masa hindia-belanda. Pada bulan Februari tahun 1920. Data statistik harus diolah dan dibagikan oleh lembaga. Kegiatan statistik pindah ke Jakarta pada 24 September 1924, dengan nama Centraal Kantoor Voor De Statistiek (CKS). Pada tahun 1930, ia melaksanakan Sensus Penduduk pertama di Indonesia. CKS berubah nama menjadi Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu selama pemerintahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942-1945 dan bertugas memenuhi kebutuhan perang dan militer.

Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dipublikasikan sesudah Indonesia merdekaan dideklarasikan pada 17 Agustus 1945, yang dipimpin langsung dari Bapak Abdul Karim Pringgodigdo. Lembaga KAPPURI dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) setelah Surat Edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C., yang berada di bawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran.

Menurut Surat Keputusan Menteri Perekonomian NoP/44, KPS berada di bawah pengawasan Menteri Perekonomian, dengan SK Menteri Perekonomian Nomor IB.099/M pada tanggal 24 Desember 1953, kegiatan KPS dibagi menjadi dua bagian: Afdeling A (Bagian Riset) dan Afdeling B (Bagian Penyelenggaraan dan Tata Usaha). Berdasarkan KeppresX nomor 172 pada tanggal 1 Juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik menyelenggarakan Sensus Penduduk serentak di tahun 1961 sesuai dengan UU No.6/1960.Setelah Indonesia merdeka, sensus penduduk pertama dilakukan.

Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/C/9 Tahun 1965, sensus penduduk dilaksanakan oleh Kantor Gubernur di tingkat provinsi, oleh Kantor Bupati/Walikota di tingkat kabupaten, dan oleh bagian yang dibentuk di tingkat

kecamatan. Di tingkat provinsi, sensus penduduk diselenggarakan oleh Kantor Gubernur dan Kantor Bupati/Walikota masing-masing, dan oleh Kantor Sensus dan Statistik Daerah.

Berdasarkan PP No.16/1968, yang kemudian diubah menjadi PP No.6/1980, menetapkan organisasi dan tata kerja BPS di pusat dan juga daerah. Kantor Statistik Provinsi dan Kantor Statistik Kabupaten atau Kotamadya adalah perwakilan Badan Pusat Statistik(BPS) di daerah. Organisasi BPS diperbarui pada PP No.2/1992, yang disahkan pada 9 Januari 1992. Selain itu, Keputusan Presiden No 6 Tahun 1992 menetapkan posisi, tugas, fungsi dan struktur organisasi BPS.

Pada 19 Mei 1997, UU No16 Tahun 1997 tentang Statistik mengubah Biro Pusat Statistik menjadi "Badan Pusat Statistik". Keputusan Presiden No.86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik menetapkan perwakilan Badan Pusat Statistik Provinsi,Kotamadya dan Kabupaten sebagai Instansi Vertikal. Selain itu, Peraturan Pemerintah No 51 tahun 1999, yang mengatur penyelenggaraan statistik di Indonesia, dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1999.

Sistem Pengelolaan Data BPS

Keakuratan dan ketepatan data statistik yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh tahap pengolahan data. Badan Pusat Statistik (BPS) dan menggunakannya sejak sekitar tahun 1960, menjadikannya instansi perintis dalam penggunaan komputer.BPS mengolah data dengan alat hitung seperti kalkulator dan sipoa sebelum menggunakan komputer.

Teknologi komputer di BPS disesuaikan pada kemajuan teknologi informasi dan memenuhi keperluan kantor.Untuk menggantikan mainframe, telah dilakukan dengan menggunakan personal kompuer yang umum agar lebih murah dan tepat waktu. Semua kantor provinsi BPS menggunakan komputer sejak 1980-an; sejak tahun 1992, kantor statistik kabupaten/kota juga menggunakan komputer.

Dengan mamakai komputer kantor Badan PusatStatistik pada wilayah daerah membuat proses dalam pengolahan data lebih efisien, Dimana beberapa kegiatan yang akan dimulai dari mengumpulkan data, lalu dimasukan data mentah ke dalama komputer dan membuat data tersebut dikirim ke kantor pusat BPS untuk dibuat menjadi data nasional. Pada pengolahan yang diterapkan pada direktorat teknis di kantor pusat Badan Pusat Statistik yang terutama jika, direktorat mempublish hasil yang telah

diperoleh sari survei yang telah dilakukan.

Tujuan pengolahan data Sensus Penduduk pada 2000 yaitu untuk mempercepat proses data. Menggunakan komputer pada Direktorat Teknisi membuat lebih efektif dan juga memotivasi karyawan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh data indikator dan statistik dengan sebanyak mungkin dan waktu yang digunakan lebih cepat daripada sebelumnya, dan komputer lebih efisien dalam menghasilkan berbagai data statistik seperti tabel input-output (IO), kemiskinan, matriks akuntansi sosial, dan sebagainya.

Untuk memenuhi kebutuhan para pemus kebijakan dalam perencanaan pembangunan, Badan Pusat Statistik mulai mengembangkan sistem informasi statistik geografis pada tahun 1993. Khususnya, data wilayah diproses untuk unit administrasi yang terkecil, yang telah dibuat secara manual sejak tahun 1970.

Dalam mengolah data, Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah melakukan pengembangan beberapa program aplikasi tentang editing, entry data, validasi, tabulasi dan untuk menganalisis menggunakan beberapa jenis bahasa dan paket komputer. BPS bertanggung jawab dalam proses mentransfer atau mengirimkan keahlian dan pengetahuan kepada staff Badan Pusat Statistik daerah dan mengembangkan berbagai perangkat lunak komputer.

BPS membangun infrastruktur mengenai teknologi informasi, diawali pada tujuan yang ingin dicapai dengan diikuti perkembangannya kebutuhan serta permintaan pada data statistik yang dikelola; memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mendapatkan informasi statistik dan pembaharuan atau inovasi pada hal pendekatan kerja yang lebih baik.

Standar Kemiskinan dan Penerapannya di Kota Binjai

Pada dasarnya, terdapat dua jenis sumber data kemiskinan yaitu data kemiskinan makro dan mikro. Data kemiskinan makro biasanya digunakan untuk tujuan geografis, sedangkan data kemiskinan mikro lebih banyak digunakan untuk tujuan perlindungan sosial rumah tangga. Kedua jenis data memiliki pengukuran, kriteria, dan cakupan berbeda.

Standar Data Mikro Kemiskinan

Pendekatan pertama menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk menghitung kemiskinan makro, Pendekatan kebutuhan dasar, yang meliputi kebutuhan dasar bukan makanan dan makanan. Yang dipakai untuk

menghitung kemiskinan makro. Garis kemiskinan dibuat dari jumlah kebutuhan dasar ini. Masyarakat yang mempunyai pengeluaran berada dibawah garis kemiskinan juga dianggap miskin. Metode ini juga dikenal sebagai metode keuangan. Adanya data kemiskinan makro tidak hanya dapat menjawab jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin secara keseluruhan, tetapi juga dapat menganalisis tingkat dan kedalaman kemiskinan di suatu wilayah (provinsi, kabupaten, dan kota).

Standar Data Makro Kemiskinan

Metode kedua yaitu kemiskinan mikro, yang menghitungnya menggunakan kriteria akses terhadap kebutuhan dasar, bukan uang. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengumpulkan dan mengolah data kemiskinan mikro untuk dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu. Dalam Basis Data Terpadu, data rumah tangga diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya dengan menggunakan metode pemeriksaan metrik proxy (PMT), yang menghitung kondisi sosial rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga.

Data yang biasa dikenal sebagai data Rumah Tangga Sasaran (RTS), yang digunakan dalam Program penanggulangan kemiskinan. Pendataan kemiskinan mikro telah dilakukan empat kali di Indonesia. Diikuti oleh data pertama berasal dari Pendapatan Nasional Ekonomi (PSE tahun 2005). Lalu, Pendapatan Program Pelindungan Sosial (PPLS tahun 2008), Pendapatan Program Pelindungan Nasional (PPLS tahun 2011), dan yang paling baru adalah pemuktakhiran Basis Data Terpadu tahun 2015 (PBDT tahun 2015) Tabel 1.1 menunjukkan perbedaan antara kemiskinan data mikro dan data makro di Indonesia.

Data Kemiskinan Makro	Data kemiskinan Mikro
<p>Metodologi Konsep <i>basic needs approach</i>. Pendekatan moneter. Didasarkan pada garis kemiskinan. Makanan (2100 kkal/hari) + non makanan estensial.</p>	<p>Metodologi Konsep multi dimensi Pendekatan non moneter Didasarkan pada indeks atau <i>proxy meanst test</i> (PMT) dari ciri-ciri rumah tangga miskin (variable non moneter) yang data dikumpulkan dengan mudah</p>
Sumber data : Susenas.	Sumber data : Pendapatan social ekonomi tahun 2005 (PSE-05), PPLS 2008, PPLS 2011, dan PBDT 2015.
Data menunjukkan jumlah penduduk miskin di level nasional, provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan estimasi	Data menunjukkan jumlah RT sasaran- <i>by name by adres</i>
Dapat digunakan pada perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis, tapi tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin.	dapat digunakan pada target sasaran rumah tangga secara langsung pada program bantuan perlindungan social (BLT, PKH, RASKIN, JAMKESMAS)

Sumber : BPS

Dalam perkembangannya, untuk mempermudah pengguna memahami data dan menentukan sasaran program, maka dikembangkan kategorisasi dalam mengklasifikasikan RTS oleh BPS, yaitu:

- 1) Sangat miskin, yaitu mereka yang konsumsi/kapita/bulan berada dibawah 0,8 Garis Kemiskinan (GK)
- 2) Miskin, yaitu mereka yang konsumsi/kapita/bulan di antara 0,8 GK dan 1 GK.
- 3) Hampir miskin, yaitu mereka yang konsumsi/kapita /bulan berada di Atara 1 GK dan 1,2 GK.
- 4) Rentan miskin, yaitu mereka yang konsumsi/kapita /bulan berada di antara 1,2 GK dan 1,6 GK.

KESIMPULAN

Statistik di Indonesia sudah ada sejak zaman Hidia Belanda. Kejadian akurat dan tepat data statistik yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh tahapan pengolahan data. Konsep yang disajikan terbatas pada indikator garis kemiskinan, menampilkan individu miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks kearah kemiskinan.

Pada dasarnya Standar data kemiskinan terdiri dari dua jenis yaitu data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro. Pendekatan pertama yaitu kemiskian makro yang dihitung oleh BPS adalah data survei Sosial Ekonomi Nasional sedangkan Kemiskinan Makro dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yang mencakupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. dari kebutuhan dasar ini dihitung suatu garis yang disebut garis kemiskinan.

Pendekatan kedua kemiskinan mikro yang perhitungannya menggunakan pendekatan *non moneter* yaitu dengan menggunakan kriteria akses terhadap kebutuhan dasar. Data kemiskinan Mikro dikelola oleh pada staf nasional percepatan mengatasi kemiskinan yang akan diolah menjadi dasar/basis data terpadu. Dalama datta rumah tangga bdasar/asis data teradu dikelompokab pada pringkat kesejahteraan dan menggunakan metode *Proxy Means Testing* (PMT) yang diperoleh agar memperkirakan keadaan sosial ekonomi setia rumsh tangga yang menggunakan data karakteristik rumah tangg, Data kemiskinan juga disebut data rumah tangga sasaryang digunakan untukenyaluran program penanggulan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statiskan Kota Binjai. (2023). Retrieved from Binjaikota.bps.go.id:
<http://Binjaikota.bps.o.id/>
- Bappenas. (2019). *Indeks Kedalaman Kemiskinan* . Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2009) *Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS) Panel Modul Konsumsi dan Kor II Garis Kemiskinan*. Jakarta: BPS (badan Pusat Statistik)
- Badan Pusat Statistik (BPS) . (2022). *(Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)*. Binjai: BPS (Badan Pusat Statistik)
- Badan Pusat Statistik (BPS) kota Binjai (2018-2022).
- Moeleng, L.J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Edisi Revisi* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, C..Achmadi.A &. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Citpa.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soraya, N. (2021). *Profil Kemiskinan Kota Binjai 2021*. Binjai: Badan Pusat Statistik Kota Binjai.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif. (pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan R&D)*.
Bandung: Alfabet.
- Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Sensus Penduduk Indonesia